

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berikut temuan yang menjadi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Nagari Lubuk Gadang Timur:

1. Minimnya dana yang dialokasikan pemerintah menjadi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi. Dalam 10 tahun terakhir anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi pupuk ini tidak pernah konstan. Anggaran yang pemerintah keluarkan tidak pernah mencukupi kebutuhan petani, terlebih pada tahun 2022 dan 2023.
2. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak melakukan penyuluhan secara menyeluruh. Dalam beberapa situasi PPL cenderung akan menyalahkan sistem dan petani yang tidak perhatian dengan perubahan sistem yang dilakukan oleh pemerintah. Seringkali PPL mengisikani RDKK kelompok tani, sehingga petani dalam hal ini tidak mengerti bagaimana caranya mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prosedur dan mengalami kelangkaan.
3. Terdapat beberapa penyelewengan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh berbagai aktor di dalam mata rantai distribusi, diantaranya: *Pertama*, Distributor pupuk bersubsidi pada umumnya menaikkan harga pupuk bersubsidi di atas HET dan meminta biaya tambahan dalam kepada pengecer pupuk bersubsidi. *Kedua*, Pengecer pupuk bersubsidi pada umumnya menjual pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang dan merahasiakan

jumlah alokasi pupuk bersubsidi kepada petani. *Terakhir*, Petani pada umumnya akan menjual kelebihan pupuk bersubsidi yang didapatkan dari alokasi dan menyewakan kuota alokasi pupuk bersubsidi kepada petani yang sedang membutuhkan pupuk bersubsidi. Dalam beberapa situasi juga ditemukan warga yang tidak bertani tetapi terdaftar di RDKK.

Dari berbagai penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh petani dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, diantaranya: *Pertama*, petani akan membeli pupuk bersubsidi di atas HET sesuai dengan harga yang telah ditawarkan oleh pengecer pupuk bersubsidi. *Kedua*, petani akan membeli pupuk non-subsidi dengan jumlah yang lebih sedikit atau dengan mencampur berbagai jenis pupuk non-subsidi menjadi satu. *Terakhir*, petani akan meminjam uang kepada toke untuk membeli pupuk atau meminta *toke* untuk membelikan pupuk dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

#### **4.2 Saran**

Dari uraian hasil temuan di atas, terdapat beberapa saran yang akan ditujukan kepada berbagai pihak sebagai evaluasi dari kebijakan yang sedang berjalan sehingga di kemudian hari diharapkan pelaksanaannya di lapangan menjadi lebih baik, berikut uraiannya:

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mengingat praktik penyelewengan pupuk bersubsidi telah berjalan sekian tahun di Kabupaten Solok Selatan. Pengawasan harus lebih rutin dilakukan dengan transparan agar

penyelewengan bisa terdeteksi lebih cepat, memberikan tempat pelaporan yang baik dengan melindungi identitas pelapor, dan tentunya pemberian sanksi yang tegas kepada para pelanggar.

2. Penyuluh Pertanian Lapangan diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dikarenakan PPL merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu dengan menerima seluruh keluhan dari para petani dan menindaklanjuti laporan tersebut kepada KP3 atau Dinas Pertanian. PPL diharapkan dapat bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip *bottom up* dan menghindari sifat paternalis, agar petani bisa tetap mandiri walaupun terjadi pergantian kebijakan.
3. Pembuat Kebijakan diharapkan dapat terus mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan dengan melihat kajian-kajian yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti, atau dengan melakukan evaluasi langsung ke tahap paling dasar, sehingga kebijakan bisa sesuai dengan tempat dan budaya bertani masyarakat. Alangkah baiknya pembuat kebijakan mempertimbangkan kondisi masyarakat di Indonesia yang beragam dengan tidak menetapkan kebijakan yang cenderung menyulitkan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
4. Kepada distributor pupuk bersubsidi, pengecer pupuk bersubsidi, dan petani diharapkan untuk menaati peraturan yang berlaku, sehingga penyelewengan yang terjadi bisa ditekan dan tercipta kestabilan pangan. Jika menemukan kasus penyelewengan diharapkan segera untuk melapor kepada pihak yang berwajib.

5. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin menelaah lebih dalam terkait masalah pertanian di pedesaan, diharapkan agar melakukan penelitian tentang penyebab petani tidak bergabung ke dalam kelompok tani.

